

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menganalisis model kelembagaan dan pengelolaan keuangan dalam layanan persampahan daerah untuk merumuskan bentuk kelembagaan yang paling sesuai dalam mendukung efektivitas layanan dan pencapaian agenda green economy. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi, penelitian ini menelaah praktik penganggaran, mekanisme pengelolaan pendapatan, struktur belanja, serta tata kelola kelembagaan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah bersama pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD sebagai model kelembagaan dasar memiliki keterbatasan signifikan, terutama karena ketergantungan penuh pada APBD, rigiditas anggaran, dan minimnya fleksibilitas operasional sehingga sulit merespons dinamika timbulan sampah maupun mengembangkan inovasi layanan. Model BUMD menawarkan fleksibilitas dan peluang pendanaan yang lebih besar, namun berorientasi profit sehingga kurang selaras dengan karakter layanan dasar yang membutuhkan keterjangkauan dan keberlanjutan publik. Sebaliknya, model UPTD–BLUD memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan orientasi pelayanan publik, karena memungkinkan pengelolaan pendapatan secara langsung, percepatan pengambilan keputusan operasional, serta peluang penguatan ekonomi sirkular tanpa kehilangan kontrol pemerintah terhadap fungsi layanan dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UPTD–BLUD merupakan model kelembagaan yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas layanan persampahan, memperkuat tata kelola keuangan, serta mendukung implementasi green economy di Kota Cimahi.*

*Kata kunci: pengelolaan sampah, green economy, sektor publik, pengelolaan keuangan, lembaga pemerintah daerah*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze institutional models and financial management in regional waste management services to formulate the most appropriate institutional form to support service effectiveness and achieve the green economy agenda. Using qualitative methods through a case study approach at UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi, this study examines budgeting practices, revenue management mechanisms, spending structures, and institutional governance through in-depth interviews, field observations, documentation, and focus group discussions with relevant stakeholders. The results show that UPTD, as the basic institutional model, has significant limitations, primarily due to its complete dependence on the regional budget, budget rigidity, and minimal operational flexibility, making it difficult to respond to the dynamics of waste generation and develop service innovations. BUMD model offers greater flexibility and funding opportunities, but its profit-oriented nature makes it less aligned with the character of basic services that require public affordability and sustainability. In contrast, UPTD–BLUD model provides a balance between flexibility and public service orientation, as it allows for direct revenue management, accelerated operational decision-making, and opportunities to strengthen the circular economy without losing government control over basic service functions. This study concludes that UPTD-BLUD is the most appropriate institutional model for improving the effectiveness of waste management services, strengthening financial governance, and supporting the implementation of a green economy in Cimahi City.*

*Keywords: waste management, green economy, public sector, financial management, local government institutions*